

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kerjasama yang terjalin antara aktor negara dengan aktor organisasi internasional dapat terjalin secara efektif dan memberikan dampak positif. Seperti kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dengan UNODC dalam usaha penanggulangan kejahatan peredaran narkoba. Melalui Indonesia Country Programme, dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia bergantung kepada otoritas lembaga penegak hukum di Indonesia, sedangkan UNODC tidak memiliki kewenangan dalam melakukan intervensi sampai tahap penanganan, sehingga keterlibatan UNODC dengan memberikan bantuan berupa bantuan teknis, saran strategis serta dana melalui program-program didalamnya.

Seperti melalui *Technical Assistance and Advise*, UNODC memberikan bantuan berupa pelatihan serta mendatangkan para ahli pada bidangnya dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia, dengan mengimpletasikan dengan bekerjasama Indonesia mengadakan Dikat Interdiksi Terpadu, hal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum dalam di bidang penyelidikan dan penyidikan narkoba serta terjalin sinergitas antar negara delegasi maupun dengan kementerian yang terkait dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba. dan UNODC membantu Indonesia dalam mengawasi titik-titik pintu masuk

Indonesia melalui Program *Container Control Programme* program ini merupakan salah satu bantuan secara teknis serta pelatihan dalam meningkatkan kapabilitas lembaga penegak hukum yang terkait dalam mengamankan dari bahaya peredaran narkoba melalui pintu masuk negara seperti pelabuhan dan bandara.

Serta UNODC memberikan fasilitas berupa informasi secara komprehensif dan transparansi mengenai perkembangan peredaran narkoba, perkembangan rute, perkembangan jenis-jenis narkoba serta perkembangan tanaman ilegal kepada lembaga penegak hukum melalui Global SMART dan Illicit Crop Monitoring Programme (ICMP) sehingga program-program ini dapat membantu lembaga penegak hukum dalam pengembangan kebijakan serta merencanakan dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah Indonesia.

Melalui program *Alternative Development* sebagai upaya langkah preventif pemerintah Indonesia dalam mengurangi pasokan ganja di Indonesia terutama di wilayah Aceh, dengan cara merubah fungsi lahan ladang ganja menjadi komoditi yang dapat membantu perekonomian warga aceh sehingga upaya ini diharapkan dapat mengurangi pasokan (*supply*) terhadap ganja. Namun tidak hanya dilakukan pencegahan, dilakukannya pembinaan kepada pengedar ataupun pengguna melalui pengembangan diri warga binaan. Dalam kegiatan ini beri wadah untuk membuka pengembangan potensi warga pembinaan serta dilakukannya pelatihan dalam membangun kreatifitas dalam membuat karya, dimana karya tersebut ditampilkan atau dijual melalui website toko stop narkoba.

Namun, terdapat kendala-kendala yang ditemukan serta tantangan yang dalam program kerjasama, keterlambatan bantuan dana dari negara pendonor dalam memberikan bantuan dana untuk melaksanakan program, hal ini disebabkan oleh adanya administrasi UMOJA UN yang membutuhkan data lengkap melingkupi staff-staff dalam melaksanakan program, namun dalam melaksanakan programnya tidak menetapnya para staff sehingga terjadi berubah data-data sehingga hal tersebut mengakibatkan keterlambatan bantuan dana hingga tidak dapat di danai.

Serta terdapat kendala dalam mengamankan dari pengendar narkoba yaitu terdapat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum Indonesia. Hal ini menjadi kendala dilapangan dimana perbandingan petugas masih minim dengan luas pintu masuk di Indonesia berbanding jauh, sehingga tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menanggulagi kejahatan peredaran narkoba di jalur laut maupun di jalur darat. Namun dalam negeripun terdapatnya oknum-oknum aparat penegak hukum menyimpang yang terlibat dalam peredaran narkoba menjadi pengguna ataupun menjadi pemasok narkoba.

Dalam pelaksanaan program *Alternative Development*, masih kurangnya upaya penyuluhan, sosialisasi program *Alternative Development* oleh pihak lembaga penegak hukum sehingga masih banyaknya masyarakat kurang mengetahui program ini, sehingga kurangnya partisipan masyarakat dalam melaporkan tentang keberadaan kebun ganja. Hal ini menyebabkan banyaknya pengedar narkoba terutama tanaman ganja di Indonesia. Serta masyarakat didaerah aceh berpandangan bahwa ganja

merupakan sejenis sayur yang bermanfaat sehingga hal ini menjadikan dilemma bagi masyarakat terutama di Aceh.

Walaupun terdapat kendala dalam melaksanakan program kerjasama ini, namun melalui kerjasama antara Indonesia dengan UNODC dapat berdampak positif antar dua pihak, dari pihak Indonesia terbantu atas bantuan dari UNODC dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia, mendapatkan bantuan berupa bantuan teknis, saran, serta informasi komprehensif mengenai perkembangan narkoba sehingga informasi tersebut dapat membantu lembaga penegak hukum yang terkait kasus peredaran narkoba dalam menentukan kebijakan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia. Dari sisi UNODC dapat menjalankan mandatnya yaitu membantu para negara anggotanya dalam memerangi kejahatan terorganisir, kejahatan peredaran narkoba serta terorisme.

5.2 Saran

Adapun saran terhadap kerjasama program kerjasama Indonesia Country Programme, yaitu kedua pihak Indonesia dengan UNODC harus melanjutkan program kerjasama ini dalam jangka panjang, dimana menurut peneliti Indonesia sebagai salah satu negara anggota yang cukup aktif dalam memerangi narkoba. UNODC dapat menjadi mitra Indonesia dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkoba, dimana UNODC mempunyai mandat menolong para negara anggotanya dalam memerangi

peredaran narkoba kejahatan dan terorisme. UNODC dan Indonesia memiliki pandang sama yang menganggap permasalahan narkoba sebagai permasalahan yang serius. Sehingga kerjasama ini dapat membantu Indonesia menentukan kebijakan serta meningkatkan keamanannya dalam menanggulangi peredaran narkoba di wilayah Indonesia.